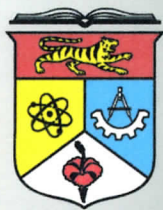




PROSIDING

Volume 13 | November 2013



SKIM XIII



Simposium Kebudayaan
Indonesia - Malaysia

Tema Utama:

“Inovasi dan Kewirausahaan untuk
Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa”

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran
2013



ISSN NUMBER



9 772339 226130

PROSIDING
SIMPOSIUM KEBUDAYAAN INDONESIA MALAYSIA XIII

Volume 13, November 2013



Universitas Padjadjaran



UNIVERSITI
KEBANGSAAN
MALAYSIA
National University of Malaysia

“Inovasi dan Kewirausahaan untuk Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa”

Diterbitkan Oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran
2013



DEWAN REDAKSI

Pengarah: Rektor Universitas Padjadjaran
Penanggungjawab: Wakil Rektor III
Narasumber: Wakil Rektor I, II dan IV, Dekan FISIP dan FEB
Ketua : Dr. H. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua : Diana Sari, S.E., M.Mgt., Ph.D
Sekretaris Umum : Dr. R. Dudy Heryadi

Kesekretariatan

Junardi Harahap, S.Sos., M.Si
Ira Indrawardana, S.Sos, M.Si
Novie Indrawati, S.IP., M.Si
Imannudin Kudus, S.IP., M.Si
Moch Fedryansyah, S.Sos., M.Si

Bendahara : Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si

Tim Bendahara

Rinka Hertika, S.AB
Sumarna, S.Pd

Tim Seminar : Ane Nurbaeti, S.P., M.P., Ph.D, Oviyanti Mulyani, SP.,MSi

Tim Persidangan

Sondi Kusweryan, Ir., MS
Savitri Aditiany, S.S., M.Pd

Tim Reviewer

Bidang Ketahanan Pangan: Dr. Reginawati Hindersah, Ir., MP dan Dr. sc.agr.Ir Agung Karuniawan, M.Sc. Agr
Bidang Kesehatan: Insi Farisa Desy Arya, dr, M.Si dan DR. Ajeng Diantini
Bidang Budaya, Bahasa, dan Sastra: Dr. Kunto Sofianto, M.Hum dan Aquarini Priyatna, Ph.D
Bidang Sosiologi-Antropologi: Drs. Ade Makmur, M.Phil dan Dr. Dra. Budiawati Supangat, M.A
Bidang Informasi dan Teknologi: Dr. Eni Maryani dan Dr. Setiawan Hadi, M.ScCs
Bidang Lingkungan Hidup: Prof. Dr. Erri Noviar Megantara, MS dan Dr. Rini Sumarwoto, Ph.D
Bidang Energi: Dr. Camellia Panatarani, M.Si dan Dr. I Made Joni, M.Si
Bidang Kebijakan: Dr. Dra. Sinta Ningrum, MT dan Dr. Yogi Suprayogi, Ph.D
Bidang Ekonomi dan Bisnis: Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE., ME dan Dr. Dian Masyita, S.E., M.T., Ph.D
Bidang Sosial, Politik, dan Keamanan: Dr. Arry Bainus, Drs., MA dan Dra. Mudiwati Rahmatunisa, M.A., Ph.D

Tim Social Event dan Sarana Prasarana

Gilang Nur Alam, S.IP., M.Sc
Aditya Febriansyah, SE

Tim Pameran

Kundrat Hidajat
Ir. Marsetio
Yus Nugraha, Drs., MA

Tim Student Forum

Handarto, Ph.D
Nuning Kurniasih, S.Sos., M.Hum

Bidang Humas

Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si
Ahmad Baehaqi, S.Si., MT
Mas Dadang Enjat Munajat, S.Si., MTI
Mohamad Noor Rizal, S.S.

**Rector,
Universitas Padjadjaran**

On behalf of Universitas Padjadjaran, please allow me to extend our warmest greetings to all distinguished guests and participants of Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM XIII). It is an honor to host this very important symposium which has been continuously organized by Universitas Padjadjaran and Universiti Kebangsaan Malaysia. I would like to congratulate and deeply appreciate the committee for their excellent works in organizing this biannual symposium. This event is also part of the 56th anniversary commemoration of Universitas Padjadjaran.

Since issues relating to innovation, creativity, and entrepreneurship in higher education are emerging, we considered these issues to be very vital for education as well as country development especially in making contribution to a better nation's prosperity and sovereignty. Universitas Padjadjaran has start to put the strategy to include innovation and entrepreneurship scheme through interdisciplinary researches, educations, community services and professional practices to increase the capacity building, competitiveness and empowerment of our human resources.

Through this symposium, we will rich our knowledge by discussing and witnessing the progress that have been made in the area related to innovation, creativity and entrepreneurship from different aspects. I believe that participants of this symposium are entirely enthusiastic and will have the opportunity to forge personal connections and build bridges between institutions that could evolve into long-lasting and meaningful academic collaboration. On the other hand, I do hope the participants will also take time to enjoy fascinating Bandung with its tropical setting, friendly people, and various cultural cuisines.

Finally, I wish you all a very successful symposium. I hope the outcome of this symposium will give substantial benefits for the nations and global welfare.

Bandung, November 2013

Prof. Ganjar Kurnia

**The Vice Rector for Collaboration,
Universitas Padjadjaran**

Research and Community Engagement of Universitas Padjadjaran

Celebrating the event of 13th biennial Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia (SKIM) 2013 in Universitas Padjadjaran (Unpad), we will more focus on innovation and entrepreneurship issue. Both issues are very important and timely to be further discussed as economic growth of any nation towards prosperity and dignity relies on achievement in both sectors, in which university plays a pivotal role. University core business in producing competent graduates requires academic environment that fosters creative learning and thinking blended with entrepreneurship outlook based on research results. Such issues will be deeply elaborated by having exchanged ideas among the lecturers and active researchers involved in this prestigious event.

SKIM initiative from Unpad and University Kebangsaan Malaysia (UKM) since 1985 has developed from department and faculty level into university-wide activity. Unpad and UKM are committed to enhance the collaboration in many aspects according to research niche of both universities through this SKIM, which can eventually become a hub for research consortium with other universities and countries at least in ASEAN region.

Hence, I congratulate the organizing committee for taking the responsibility in translating such expectation from Unpad and UKM. Finally, I look forward to the follow up of this SKIM by having joint research collaboration and joint supervision to be presented in upcoming SKIM XIV in 2015 in Malaysia organized by UKM.

Bandung, November 2013

Dr. Med. Setiawan

**Ketua Panitia Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia XIII
Universitas Padjadjaran**

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Symposium Kebudayaan Indonesia – Malaysia XIII (SKIM XIII) ini merupakan ajang pertemuan dan silaturahmi para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Inovasi dan Kewirausahaan untuk Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa merupakan tema dari kegiatan ini mengandung arti berbagai perubahan paradigme akademisi menjadi bagian dari kedinamisan ilmu ini untuk berkembang.

Silaturahmi para pakar berbagai disiplin ilmu ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran utama dari lembaga pendidikan yang dapat member sumbangan saran kepada pemerintah dan masyarakat melalui peran aktif para pakarnya. Media diskusi SKIM XIII disajikan melalui dialog akademik, *Keynote Speech*, Plenary Symposium dan parallel Session sebanyak 10 cluster yaitu Ketahanan Pangan, Kesehatan, Budaya, Bahasa dan Sastra, Sosiologi-Antropologi, Informasi dan Teknologi, Lingkungan, Energi, Kebijakan (Policy), Ekonomi dan Bisnis, dan Sosial, Politik dan Keamanan.

Produk dari pertemuan pemikiran ini diolah dibuatkan dalam bentuk prosiding teregister ISSN, Chapter in Book teregister ISBN serta full Paper terseleksi bisa terpublikasi pada jurnal internasional terindex scopus, serta penghargaan bagi *Best Presentation*. Disamping itu, terjalin kerjasama antara penyaji dan peserta untuk kegiatan riset kolaborasi, pertukaran dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pendidikan dan kualitas lulusan.

Akhirnya, kami sebagai penyelenggara SKIM XIII merasa terhormat untuk menyelenggarakan kegiatan ini, terimakasih atas kerjasama Bapak dan Ibu sekalian dan selamat untuk selalu berkarya yang inovasi dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan dunia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, November 2013
Salam Hormat,

Dr. H. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si.

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran**

Assalamualaikum. Wr. Wb.

SKIM XII yang diselenggarakan oleh UKM pada tahun 2011 mengupas tema SKIM XII "Pemeriksaan Modal Insan: Ke Arah Kesejahteraan Serantau" tema ini secara konseptual telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan spiritual maupun fisik di antara kedua negara. Dalam bidang pendidikan berkaitan dengan modal insan telah melibatkan banyak kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Malaysia seperti twinning program, transfer kredit, pertukaran dosen, pertukaran pelajar dan kursus-kursus kemahiran telah membawa hubungan yang semakin baik antara dua negara serumpun.

Bertolak dari realitas dan pemikiran demikian, muncul berbagai persoalan yang menarik untuk didiskusikan dalam SKIM XII. Dalam kerangka itulah maka tema SKIM XIII "Inovasi dan Kewirausahaan untuk Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa". Adapun latar belakang tema ini dengan dasar pemikiran bahwa SKIM telah berlangsung dua belas kali selama kurang lebih 28 tahun telah membahas berbagai tema. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1814 ditandatangani Perjanjian Britania-Belanda yang isinya antara lain memisahkan wilayah penjajahan Belanda dari wilayah penjajahan Inggris. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata perjanjian ini tidak hanya semata membagi wilayah nusantara menjadi wilayah jajahan Inggris dan Belanda saja, tapi juga pembagian ini kemudian meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan yang lain. Termasuk sendi ekonomi, kebudayaan dan bahkan pendidikan dalam hal ini diantaranya bidang Antropologi Sosiologi. Menarik untuk disimak hasil kontribusi peneliti terkait tema-tema baru yang ditawarkan pada SKIM XIII ini, yang pastinya terus berjalan ke arah positif demi kemajuan bersama.

Akhirnya, kontribusi dari para cendekia ini diharapkan tidak sampai kegiatan ini saja, tapi bisa diteruskan sampai ke tingkat pengaplikasian, sebagaimana tema dari SKIM XIII ini yaitu Inovasi dan Kewirausahaan untuk Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa, bagaimana membawa perubahan ilmu ini menuju kebaikan bangsa.

Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian, akhir kata selamat beraktifitas pada Simposium ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, November 2013
Salam Hormat,

Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S.

**Dean Faculty of Economics and Management,
Universiti Kebangsaan Malaysia**

Symposium Kebudayaan Indonesia – Malaysia (SKIM) XIII 2013 is a platform for deliberations on issues relating to innovation and entrepreneurship in higher education from both countries. I believe that this platform will be used to generate new and novel ideas derived from research conducted by academics that will directly impact on human capital in terms of innovation, capacity building, competitiveness and empowerment.

As issues of regional economic co-operation are keenly articulated and observed in anticipation of ASEAN COMMUNITY 2015, I hope that academics from both institutions will take this opportunity to engage in dialogues leading to collaborative effort that will lead to integrated economic initiatives and structural reforms in our joint pursuit towards a high income economy.

Finally, I would like to congratulate Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia (UNPAD) and Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), particularly, the organizing committee in realising this Symposium. I hope this Symposium will also strengthen our mutual commitment to regional academic scholarship and research.

Prof. Dr Nor Ghani MD. Nor

**Dean of Faculty of Economics and Business
Universitas Padjadjaran**

Dear our valued participants,

It is indeed my great pleasure to welcome all the participants of The XIII SKIM 2013 which proudly organised by Universitas Padjadjaran and Universiti Kebangsaan Malaysia

This year's theme of Innovation and Entrepreneurship reminds me of Peter Drucker's (1985) book *Innovation and Entrepreneurship Principles and Practices*. At that time America employed 10 million more people than had been predicted, and its dynamic economy was headed toward a primarily entrepreneurially inspired, innovative business culture. Drucker's ideas were the panacea for institutional giants of his time, and the business climate of the 80s was ripe for adopting them. However today, the demand for innovation on an international scale and for the entrepreneurship that accompanies it will focus increasingly on being more purpose-driven. With intention at the helm, innovation and entrepreneurship will adapt to accommodate the changing focus of the drive to live a better life, do good, save the planet and be more productive. It's no longer about information as Drucker thought. It's about building a better world and a better life through innovation with a purpose. The spirit of innovation in professional management and all business functions has to be devised. Moreover, through this conference it will be a great opportunity to exchange the knowledge and the information in many aspects.

I do hope this conference will contribute to the development of the changing focus to more purpose-driven. Together with other academic and business groups we are ready to face the challenges ahead of us and to be part of the team to build a better future of our nations.

Finally, let me wish you every success with your efforts, and on behalf of the Faculty may I welcome you to this conference.

Dr. Nury Effendi, SE., MA

**The Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation)
Universiti Kebangsaan Malaysia**

It is with utmost pleasure that I would like to congratulate the Organizing Committee of SKIM XIII 2013 for their dedicated and commitment in organizing this year's Symposium.

The choice for this year's theme, *Innovation and Entrepreneurship for the Nation's Prosperity and Sovereignty* is timely and appropriate. As a research university and provider of human capital for today's world of changing demands, UKM has begun to initiate and calculate the culture of innovation into it's research and academic programs. This innovative human capital will pave the way for commercialization and the creation of an entrepreneurial mindset, key elements to transform Malaysia to a high income nation.

With the highly dynamic and competitive higher education ecosystem, this Symposium thus provide a forum for sharing common trials, tribulations and successes in our endeavors. I am also happy to note that aside from paper presentation, the conference has also include dialogues and research meetings that may act as catalysts to the identifying of common areas and theme for future and further collaborations.

Finally, I am confident that Symposium will achieve its objectives and that the Universiti Kebangsaan Malaysia and Universitas Padjadjaran Bandung Indonesia ties will be further strengthened.

Profesor Dato' Dr. Rahmah Mohamed

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Sambutan	
Rector of Universitas Padjadjaran	ii
The Vice Rector for Collaboration of Universitas Padjadjaran	iii
Ketua Panitia Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia XIII Universitas Padjadjaran	iv
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran	v
Dean Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia	vi
Dean of Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran	vii
The Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation) Universiti Kebangsaan Malaysia	viii
Agenda	x
Pleno	
Triple Helix in the development of Phytomedicine for New Drug Discovery (Keri Lestari Dandan, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran)	xii
Intellectual Property from University to Enterprise Development (Professor Dato' Dr. Rahmah Mohamed, Universiti Kebangsaan Malaysia)	xiii
Challenges building a nation-state: argument and agreement (Shamsul A.B, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM))	xiv
Translating Research from Bench to Bedside: Stem Cell, Tissue Engineering and Regenerative Medicine (Ruszymah Bt Hj Idrus, UKM)	xv
Holistic Approach on Agriculture Community Development : A case in Action Research of Vegetables Supply Chain Development (Tomy Perdana, Universitas Padjadjaran)	xvi
Indonesia Dan Perkembangan Asean Kontemporer (Prof. Yanyan Mochamad Yani, MAIR., Ph.D)	xvii
Reducing disparity through regions-focused development: A modeling approach of assessing the Indonesian MP3EI (Arief Anshory Yusuf, Universitas Padjadjaran)	xviii
Abstract	
Topic : Arts	1
Topics: Economics and Business	14
Topics: Energy	38
Topics: Environment	43
Topics: Food Security	58
Topics: Health	66
Topics: Information and Technology	79
Topics: Policy	85
Topics: Social, Politics and Security	106
Topics: Sociology Anthropology	158

AGENDA

TIME	ACTIVITY DAY 1 (12 Nov 2013)
8.00-14.00	Arrival
14.00-15.00	Academic Entrepreneur Dialogue Chairperson : Dr. med. Setiawan, dr Panelis from UKM : Prof. Dr. Mohd.Fauzi Md Joni dan Prof. Madya Zaimah Darawi Panelis from Unpad : Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, Drs, M.Si dan Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, M.Sc
15.00-16.00	Ecosystem and Commercialization R &D Chairperson : Prof. Dato' Dr. Rahmah Mohamed (Deputy Vice Chancellor, UKM) Co-Chair Person : Dr. Diana Sari Panelis from UKM: Prof. Dr. Juhana Salim (PIK), dan En. Zanri Ismail (UKM Tech) Panelis from Unpad : Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS dan Prof. Dr. Tualar Simarmata, Ir, M.S.
19.00-22.00	Courtesy Dinner Unpad-UKM

TIME	ACTIVITY DAY 2 (13 Nov 2013)
8.00-8.30	Opening speech by : - Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA (Rektor Universitas Padjadjaran) - Prof. Tan Sri Dato' Wira Sharifah Hapsah Syed Hassan Shabuddin (Vice-Chancellor of UKM) Title : The Role of University in Innovation Economy
8.30-10.00	Keynote Speech: - Dr. Sapta Nirwandar (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia) - "Creative Economy for Nation Welfare, Indonesia Case" - Y.Bhg. Dato' Dr. Mohd. Nazlee Kamal (Chief Executive Officer, Malaysian Biotechnology Corporation-BioTechCorp) "Bioeconomy for Nation's Prosperity"
10.00-10.30	COFFE BREAK
10.30-12.30	Plenary Simposium - Dr. Keri Lestari (Fakultas Farmasi Unpad) "Triple Helix in Development of Phytopharmacy for New Drug Discovery" - Dr. Tommy Perdana, SP, MM (Fakultas Pertanian Unpad) "Holistic Approach in Agriculture for Community Development" - Prof. Dato' Dr. Ruszymah Hj. Idrus (Head of Tissue Engineering Center, UKM) "Translating Research from Bench to Bed Side: Stem Cell and Regenerative Medicine" - Prof. Dato' Dr. Rahmah Mohamed (Deputy Vice Chancellor Research and Innovation Affairs UKM) "Intellectual Property of University to Enterprise Development" - Moderator/chairperson: Prof. Dr. Ir. H. Roni Kastaman, MSIE
12.30-13.30	BREAK
13.30-15.30	Parallel Session Oral Presentation
15.30-15.45	Coffee Break
15.45-17.00	Parallel Session Oral Presentation
18.00 - selesai	Shalat Maghrib GALA DINNER at Gedung Sate

TIME	ACTIVITY DAY 3 (14 Nov 2013)
8.00-10.00	Parallel Session Oral Presentation
10.00-10.30	COFFEE BREAK
10.30-12.30	<p>Plenary Simposium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arief Anshory Yusuf, SE, M. Sc, Ph.D (Fakultas Ekonomi Unpad) <i>"Reducing Disparity through regions-focused development : A modelling approach of assessing the Indonesian MP3EI"</i> - Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin (Director of Institute Kajian Etnik (KITA), UKM) <i>"Challenges of Building A Nation State"</i> - Prof. Yanyan Mochamad Yani, MAIR, Ph.D (FISIP Unpad) <i>"Indonesia and The Dynamic of International Relation in The South East Asia Region: Challenges and Opportunities"</i> - Yang Amat Mulia Tungku Besar Seri Menanti, Tungku Ali Redhauddin ibni Tuanku Muhriz (UKM) <i>"Social Business for Empowering Community Economic Growth"</i> <p>Chairperson : Prof. Dato'Rahmah Mohamed</p>
12.30-13.00	Closing : Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor
14.00-19.00	Cultural Event Saung Angklung Udjo, Padasuka, Bandung

✓ **MODEL PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI JAWA BARAT**
SONI AKHMAD NULHAQIM, Muhammad Fedryansyah, Sri Sulastri, Hadiyanto Rachim
UNPAD; soninulhaqim@yahoo.com

Abstrak

Pemahaman secara mendalam atas konflik sosial yang terjadi, tidak mungkin dilakukan secara parsial tetap harus komprehensif. konflik tidak hanya dilihat dari peristiwa konflik, namun juga melihat akar masalah konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Pelibatan stakeholder dalam penanganan konflik baik dalam mengatasi atau meredam konflik, maupun mencegah terulangnya peristiwa konflik tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kasus pada empat wilayah koordinasi pembangunan di Jawa Barat. Aspek yang diteliti meliputi kebijakan, kelembagaan, pemetaan konflik dan upaya penyelesaiannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Penelitian ini menemukan konsep tentang penanganan konflik antar warga. Penanganan konflik antar warga di Jawa Barat harus mengacu pada aspek kebijakan, kelembagaan stakeholder dan kearifan lokal. Kebijakan yang komprehensif baik dalam bentuk produk maupun implementasi kebijakan. Kelembagaan stakeholder dibangun berdasarkan komitmen dan sinergisitas dalam proses penanganan konflik. Kemudian, kebijakan dan kelembagaan stakeholder dapat mewadahi Kearifan lokal yang meliputi aspek kewilayahan dan budaya.

Keywords: Konflik Antar Warga, penanganan konflik, Jawa Barat

MODEL PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI JAWA BARAT

Oleh : *Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si.*

Dr., Dra., Sri Sulastri, MS.

Muhammad Fedryansyah, S.Sos., M.Si.

Hadiyanto A Rachim, S.Sos., M.I.Kom.

A. Pendahuluan

Suatu kelompok cenderung bersifat dinamis yang selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Dalam perkembangannya, kelompok tersebut akan menciptakan heterogenitas kelompok atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkungannya. Sifat dinamis ini ditandai dengan adanya interaksi-interaksi antar anggota kelompok maupun antar kelompok yang menyebabkan terjadinya tukar-menukar pengalaman yang sering disebut dengan istilah *social experiences* (Bogardus, 1954: 4).

Interaksi ini merupakan hubungan sosial yang dapat mengarah pada hal yang positif maupun negatif. Interaksi ini merupakan fundamen dari proses sosial dan proses tersebut dapat bersifat menggabungkan, memecahkan, maupun mempertemukan kembali para pelaku interaksi tersebut. Interaksi dapat berbentuk kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertikaian (*conflict*). Jika interaksi atau hubungan tersebut dikategorikan positif maka hubungan tersebut berorientasi pada kerja sama sedangkan jika dikategorikan negatif hubungan tersebut mengarah pada konflik atau pertikaian, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu hubungan sosial.

Hubungan yang bersifat negatif ini yang kemudian disebut sebagai masalah sosial. Konflik merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah manusia. Konflik berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus. Perkembangan kebudayaan semakin menambah kompleks konflik-konflik yang terjadi dan juga menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dari masa-masa lampau. Karena konflik itu sendiri merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat (Nasikum, 2001: 16).

Salah satu bentuk perkembangan kebudayaan di masyarakat adalah pembangunan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terus melakukan pembangunan, Jawa Barat tidak lepas dari potensi konflik di masyarakatnya. Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan persaingan di antara penduduk untuk memperebutkan sumber daya

penghidupan. Semakin lama sumber daya penghidupan ini semakin sempit sementara peserta persaingan semakin meningkat. Pada akhirnya terjadi persaingan tidak sehat untuk memperebutkan lahan sumber penghasilan yaitu persaingan dengan menggunakan segala cara seperti menggunakan kekuasaan, kekuatan materi dan kekuatan fisik. Persaingan yang terjadi dengan menggunakan kekuatan fisik dimana siapa yang kuat dialah yang menang, tidak menutup kemungkinan hukum rimba terjadi dalam persaingan ini.

Persaingan yang tidak sehat ini lama-kelamaan menimbulkan kecemburuan sosial dan juga menimbulkan rasa tidak adil (*in-justice*). Seiring semakin merasa terjepitnya mereka dalam kesulitan perasaan-perasaan kurang puas dan iri hati akan semakin menumpuk (berakumulasi). Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya konflik antar warga di Jawa Barat.

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk mengungkapkan penanganan konflik antar warga di Jawa Barat yang dilihat dari lembaga-lembaga yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan konflik. Terdapat tujuh belas (17) lembaga yang terkait dengan penanganan konflik. Lembaga-lembaga tersebut diidentifikasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik. Ketujuh belas lembaga tersebut antara lain Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Kesbangpol Jawa Barat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, BPMPD Jawa Barat, Biro Pelayanan Sosial Jawa Barat, MUI Jawa Barat, Satpol PP Jawa Barat, BPBD Jawa Barat, Dinas Sosial Jawa Barat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

B. Penanganan Konflik dan Praktik Pekerjaan Sosial

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa konflik sosial merupakan perselisihan yang menyangkut pertentangan dan kondisi yang tidak baik, dari hal itu pengertian konflik sosial terus berkembang dan mendefinisikan berbagai jenis dan penyebab terjadinya konflik sosial seperti yang diungkapkan oleh Lewis A. Coser berikut ini :

Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (Lewis A. Coser).

Definisi konflik yang diungkapkan oleh Coser merupakan komponen terjadinya konflik yang terdiri dari perjuangan atas nilai-nilai dan menuntut status yang langka, kekuasaan, dan sumber yang menetralkan tujuan-tujuan lawan untuk melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka (Kinloch, 2005 : 227).

Kemudian beberapa teori sosial menekankan beberapa konflik sosial memiliki akar dalam pemikiran Karl Marx (1818-1883). Dalam pemikirannya Karl Marx memandang konflik menekankan interpretasi materialis tentang sejarah, metode dialektika analisis, sikap kritis terhadap pengaturan sosial yang ada, dan program politik dari revolusi atau, setidaknya, reformasi.

Berbeda dengan Marx, Jhon Galtung (2003:439) memaknai konflik tidak hanya sekedar adanya perbedaan, tetapi perbedaan tersebut sudah mengarah kepada tindak kekerasan. Kekerasan tersebut bersifat langsung misalnya perampasan kebutuhan. Kekerasan langsung tersebut disebabkan oleh kekerasan struktural. Kekerasan struktural dilegitimasi oleh kekerasan struktural.

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan (melukai, merusak bangunan dan simbol-simbol lawan, menyiksa dan membunuh). Kekerasan langsung ini sangat mudah diidentifikasi dan terlihat karena merupakan manifestasi dari kekerasan kultural dan struktural.

Kekerasan langsung dapat dibagi menjadi kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan fisik mencederai tubuh, sedangkan kekerasan verbal dapat mengganggu pikiran atau jiwa. Kedua kekerasan tersebut meninggalkan trauma yang dapat membekas dalam pikiran (*poisoning memory*). Kekerasan aktor atau langsung didefinisikan dalam ruang orang, sosial, dunia dan dikehendaki, oleh individu-individu yang bertindak sendirian atau dalam kolektivitas.

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial. Kekerasan struktural terbagi ke dalam kekerasan vertikal dan horizontal. Kekerasan struktural vertikal biasanya bersifat politis (represif) dan ekonomis (eksploitatif) didukung oleh penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan marjinalitas struktural. Kekerasan struktural horizontal terjadi pada hubungan antar kelompok yang setara tetapi ada salah satu kelompok yang mendominasi.

Kekerasan kultural adalah kekerasan yang terdapat di dalam kultur (budaya) masyarakat. Kekerasan kultural ini menjadi potensi konflik kekerasan, dapat diidentifikasi dalam simbol-simbol budaya seperti: istilah-istilah, priahasa, mitos, benda

budaya dan konsep budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam simbol-simbol budaya itu dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap konflik atau tindak kekerasan tertentu, karena simbol-simbol budaya itu merupakan kristalisasi struktur sosio kultural masyarakat.

Dalam konteks penanganan konflik, praktik pekerjaan sosial yang terkait adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial dapat menjadi salah satu alternatif yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat terutama dalam upaya peningkatan keberfungsian sosial di masyarakat. Pelayanan sosial disini tidak hanya merupakan upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melainkan juga merupakan usaha untuk menjamin keberfungsian lingkungan sosial seperti kelompok, organisasi dan masyarakat. Berbagai metode digunakan oleh para pekerja sosial untuk menolong individu dan keluarga melalui kombinasi berbagai pelayanan sosial, misalnya dengan metode penyembuhan sosial pengembangan individu atau kelompok dan pengembangan organisasi dan masyarakat.

Pelayanan sosial membentuk dan menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan bagi terwujudnya pemecahan masalah yang dialami individu, kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah sosial dan membutuhkan pertolongan sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Didasarkan pada fungsinya, pelayanan sosial terbagi menjadi beberapa tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan dari pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Soetarso (1993:33) yaitu :

- 1) Melindungi atau memulihkan kehidupan keluarga.
- 2) Membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya,
- 3) Meningkatkan proses perkembangan yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya
- 4) Mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan.

Pelayanan sosial disini selain menjalankan fungsinya, juga melakukan pemulihan suatu keadaan bermasalah menjadi suatu kondisi yang baik. Kegiatan dilakukan dengan cara membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, pelayanan sosial mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan untuk menjangkau dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan atau kemampuan untuk memahami pelayanan sosial manakah yang sesuai dengan permasalahan. Disini terlihat keterlibatan pekerja sosial sebagai pemberi pertolongan untuk meningkatkan kemampuan penyandang masalah sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Pelayanan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas atau sumber-sumber pertolongan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelayanan sosial pun harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dari penerima pelayanan. Dengan begitu tujuan dari pelayanan dapat tercapai serta efisien, seperti yang dijelaskan Friedlander dalam Iskandar (1993 : 30) bahwa pelayanan sosial mencakup fungsi berupa:

- 1) Fungsi penyembuhan dan pemulihan (kuratif/remedial dan rehabilitatif)
- 2) Fungsi pencegahan (preventif)
- 3) Fungsi pengembangan (promotif, *developmental*)
- 4) Fungsi penunjang (supportif)

Terkait dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut, bidang pekerjaan sosial menggunakan berbagai metode untuk dapat mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, pekerjaan sosial juga dipandang sebagai suatu profesi yang menangani pemecahan masalah sosial dan menyelesaikan konflik (Parsons, 1988). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam kaitannya dengan penanganan konflik, pekerjaan sosial dapat menggunakan metode-metode praktiknya. Penggunaan metode praktik itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mencegah maupun menyelesaikan masalah sosial. Termasuk di dalam salah satu masalah sosial yang dapat ditangani oleh pekerjaan sosial tersebut adalah konflik yang terjadi di masyarakat.

C. Model Penanganan Konflik Melalui Pelibatan Stakeholder

Beragam model penanganan konflik telah dirumuskan berdasarkan pada hasil-hasil kajian mengenai kejadian atau peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia. Triguna (1997), Sunatra (1997), Ridwan (2003), dan Bahari (2005) merumuskan resolusi konflik yang mengedepankan pemahaman dan pengetahuan mengenai simbolisme budaya pada suatu daerah termasuk di dalamnya peran dari tokoh-tokoh tradisional yang terlibat. Model lain dikemukakan oleh Hamdani (1997) yang melihat dari segi keorganisasian dalam penyelesaian konflik. Model lain dalam resolusi konflik juga disampaikan oleh

Sulaeman (2003), dan Veplun (2004) lebih memfokuskan resolusi pada konflik individual baik vertikal maupun horizontal.

Melihat pada beragam model penanganan konflik yang telah dirumuskan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada model penanganan konflik yang melibatkan *stakeholder* terakait. Model ini juga dipilih dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik. Di dalam undang-undang tersebut secara implisit juga menyebutkan tentang pihak-pihak yang terkait dalam penanganan konflik.

Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk merumuskan model penanganan konflik yang melibatkan *stakeholder* dan sekaligus juga memperhatikan hasil-hasil rumusan penanganan konflik yang telah ada. Rumusan model tersebut nantinya akan diterapkan sebagai suatu produk kebijakan sosial yang dapat diterjemahkan oleh *stakeholder* dalam bentuk program-program maupun proyek-proyek. Program-program dan proyek-proyek tersebut akan mengisi tahapan konflik seperti pencegahan, penyelesaian, serta rehabilitasi.

Dalam manajemen kolaboratif, Tadjudin membatasi penggunaan istilah *stakeholder* dengan berporos pada pernyataan Hobley (1996 dalam Tadjudin, (2000) yang menyebutkan, bahwa *stakeholder* adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terpengaruh (dampak) kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya Grimble dkk. (1994 dalam Hobley 1996, yang dikutip oleh Tadjudin, 2000) menyebutkan lima kategori yang berkaitan dengan *stakeholder*, yaitu:

- 1) *Primary Stakeholder*: adalah orang, tumbuhan, binatang yang sangat bergantung pada sumberdaya dalam suatu kawasan (misalnya hutan) untuk keberlangsungan hidupnya
- 2) *Secondary Stakeholder*: adalah orang atau organisasi yang memiliki hak atau kepentingan terhadap sumberdaya atau wilayah tertentu, termasuk di dalamnya adalah organisasi industrial dan pemerintahan.
- 3) *Micro-level Stakeholder*: adalah kelompok local berskala kecil yang merupakan pengguna dan pengelola suatu sumberdaya melalui kegiatan hariannya.
- 4) *Macro-level Stakeholder*: adalah perncana wilayah dan nasional, instansi pemerintah di tingkat pusat, komunitas global, dan konsumen global.
- 5) *Stakeholder Analysis*: adalah suatu proses yang menjabarkan sifat, ciri, dan atribut yang dimiliki oleh *stakeholder*.

Menurut Tadjudin (2000) di dalam manajemen kolaborasi sekurang-kurangnya terdapat lima *stakeholder* yang berinteraksi yang memiliki hak dan tujuan yang berbeda. Kelima *stakeholder* tersebut diantaranya adalah masyarakat, pemerintah, swasta, hutan, dan lembaga penyangga. Dalam sistem manajemen kolaborasi para *stakeholder* memiliki kedudukan yang sederajat dan didorong agar mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan individunya menjadi tujuan kolektif yang disepakati bersama.

Mitchell (1997) dalam Magness (2008) mendeskripsikan bahwa *stakeholder* memiliki tiga karakteristik atau faktor utama: yaitu kekuasaan, legitimasi dan urgensi atau kepentingan. Legitimasi mengacu pada penerimaan sosial dan perilaku yang diharapkan. Kekuasaan, menurut kegunaannya, mengacu pada sikap untuk mengendalikan sumber daya. Urgensi muncul ketika muncul isu yang menuntut adanya perhatian. Ketiga atribut ini telah terkonstruksi dan berakar secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat beberapa komponen *stakeholder* dalam penanganan konflik :

- 1) Masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan segala aturan-aturan sosial yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan tindakan bagi individu-individunya. Dalam aturan sosial masyarakat terdapat status dan peran yang berwujud pada struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan sosial dinyatakan dalam bentuk pranata sosial atau institusi sosial masyarakat yang bisa berbentuk pranata mata pencaharian, keagamaan, kesenian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari peranan-peranan yang diwujudkan oleh individu-individunya sangat terkait pada kedudukan tertentu sebagai anggota masyarakat.
- 2) Pemerintah merupakan birokrasi yang mengatur pencegahan dan penanganan konflik melalui regulasi atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua *stakeholder* dalam melaksanakan aktivitasnya. Aturan-aturan ini tertuang dalam pranata-pranata sosial yang berlaku dalam negara.
- 3) Beberapa bentuk *stakeholder* yang ada di masyarakat dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk. Masing-masing *stakeholder* ini berada di luar masyarakat sebagai elemen yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat. Sehingga elemen-elemen tersebut membentuk sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan membentuk struktur dan berfungsi satu sama lain serta mempunyai tujuan masing-masing

Di dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) *stakeholder* utama yang berpengaruh dalam penanganan konflik antar warga yaitu: pemerintah, masyarakat, dan organisasi. Pemerintah melakukan penanganan konflik antar warga melalui penyelenggaraan program-program pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan yang dimandatkan oleh warganya, pemerintah membuat berbagai regulasi yang ditujukan kepada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pihak yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya akan menerima program-program penanganan konflik, melainkan sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu *people-centered development*. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penanganan konflik.

Pihak ketiga yang terlibat adalah organisasi. Organisasi yang terlibat dalam penanganan konflik adalah organisasi yang turut menyelenggarakan program-program pembangunan. Organisasi ini dapat pula yang menyediakan dana untuk kegiatan pembangunan di masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat lokal maupun internasional termasuk salah satu bentuk organisasi yang turut mempengaruhi program pembangunan; bahkan tidak jarang lembaga-lembaga tersebut menempati kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan mengingat mereka tidak hanya melaksanakan melainkan juga memiliki sumber pendanaan untuk penyelenggaraannya. Interaksi ketiga pihak ini menentukan bentuk dari kegiatan penanganan konflik antar warga. Setiap pihak akan memainkan peran berdasarkan kepentingannya masing-masing.

D. Peran Kelembagaan Dalam Penanganan Konflik Antar Warga Di Jawa Barat

Pada bagian ini akan dibahas hasil temuan lapangan mengenai model penanganan konflik antar warga di provinsi Jawa Barat. Temuan lapangan terdiri dari kondisi eksisting penanganan konflik oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan konflik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, setidaknya diidentifikasi 17 (tujuh belas) lembaga, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM, LSM, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa

Barat, Polda Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang dimandatkan dalam penanganan konflik. Dari hasil penelitian lapangan dapat diidentifikasi peran dari masing-masing lembaga tersebut. Berikut pemaparan mengenai kondisi eksisting penanganan konflik antar warga dari tujuh belas lembaga di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Model Penanganan Konflik Antar Warga

Lembaga	Landasan Kebijakan dan Deskripsi	Program dan Penanganan Umum
Dinas Sosial Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.24 Tahun 2007 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keserasian Sosial
Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT. 01.01. Tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik - Sosialisasi Tentang Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat
Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kerukuan Umat Beragama (KUB) - Diskusi antar aktor yang terlibat dalam konflik dengan difasilitasi oleh KUB
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat - Program Peningkatan Pemahaman Kehidupan Beragama - Peningkatan Pemahaman Kehidupan Berbangsa
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Komisi Nasional HAM merupakan lembaga yang memiliki cakupan kerja di tingkat nasional, sehingga kebijakan yang menjadi acuan adalah kebijakan di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan konflik yang dilakukan oleh Komnas HAM bersifat nasional, dalam artian Komnas HAM tidak menangani secara langsung konflik yang terjadi di tingkat provinsi, kabupaten/kota
Lembaga Swadaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dalam konflik vertikal yang bertujuan untuk menyetarakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan konflik yang melibatkan LSM di Jawa Barat pada umumnya

	posisi dari aktor yang terlibat.	lebih diarahkan pada peristiwa konflik yang menempatkan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai korban.
Dinas Pendidikan Jawa Barat	- Pembentukan karakter masyarakat melalui pendidikan.	- Pendidikan multikultur yang membantu siswa memahami pola perilaku dan interaksi masyarakat Indonesia yang beragam etnis, budaya, serta agama.
Dinas Kesehatan Jawa Barat	- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat	- Penanganan dan pelayanan kesehatan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB).
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat	- Upaya preventif terhadap terjadinya konflik	- Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
Biro Pelayanan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	- Perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan. - Evaluasi agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan lingkungan hidup.
Majelis Ulama Indonesia Kanwil Jawa Barat	- Fatwa terkait aliran-aliran yang berhubungan dengan agama Islam.	- Mengarahkan umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan menjaga toleransi antar umat beragama melalui fatwa-fatwa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	- BPBD berfokus kepada penanganan bencana alam namun hal tersebut berkaitan dengan bencana sosial, karena

		jika ada keterlambatan penanganan bencana alam tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bencana sosial.
Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	- Pengendalian keamanan dan ketertiban umum.
Kepolisian Daerah Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kepolisian	- Pengendalian konflik langsung - Koordinasi dengan kepolisian di tingkat Polres (Kabupaten/Kota)
DPRD Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009	- Pengawas, dan pembuat kebijakan (legislasi), dan penyesuaian anggaran.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	- Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM).
Kodam Jawa Barat	- Undang-Undang No.34 Tahun 2004	- Pengamanan ketika terjadi konflik. - Pengembalian kondisi paska konflik di masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang keharmonisan sosial yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

E. Penutup

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan konflik antar warga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik. Dari Undang-undang tersebut, setidaknya diidentifikasi 17 (tujuh belas) lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik. Terkait dengan penanganan konflik antar warga, lembaga-lembaga yang diidentifikasi berdasarkan undang-undang tersebut antara lain Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM, LSM, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa

Barat, Polda Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data terkait yang dengan kejadian atau peristiwa konflik antar warga di Jawa Barat sangat terbatas. Masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait masih menganggap konflik antar warga sebagai sesuatu yang lumrah dan dapat diselesaikan secara adat istiadat setempat. Penyelesaian kejadian atau peristiwa konflik antar warga tersebut pada umumnya ditangani oleh tokoh masyarakat bukan lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang. Peran kelembagaan dalam penanganan konflik antar warga di Jawa Barat cenderung pada fase penyelesaian konflik. Dan lembaga yang berperan langsung dalam fase penyelesaian konflik tersebut hanya dari pihak kepolisian. Sedangkan, lembaga-lembaga lain lebih memfokuskan pada fase rehabilitasi dan pencegahan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann, 1998; World Business Council for Sustainable Development.
- Colby, Ira. 2008. *Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare. Volume 4*. Canada: John Wiley&Sons, Inc.
- Galtung, Johan, 2003, *Studi Perdamaian; perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Hall, Anthony & James Midgley. 2004. *Social Policy for Development*. London: Sage Publications.
- Hilgartner, S. & Bosk, C.L. 1988. "The Rise and fall of social problems: A Public arena model". *The American Journal of Sociology*, 94 (1), 53-78.
- Joe Leung (Tahun, halaman)
- Joseph Fin Kun Kwok (Colby, 2008 : 25)
- Magness, V. (2008). Who are Stakeholders Now; An Empirical Examination of The Mitchell, Agel, and Wood Theory of Stakeholder Salience. *Journal of Business Ethics* No. 83 , 177-192.
- Nasikun, 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rubin, Allen and Earl R. Babbie. 2008. *Research Methods for Social Work*. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Rudito, B., Budimanta, A., & Prasetyo, A. (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Soetarso.1993. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*. Bandung : STKS.
- Stone, D. (2002). *Policy paradox*. New York: W.W. Norton & Company.
- Tadjudin, Djuhendi, 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: LATIN
- Thompson, Neil. 2005. *Understanding Social Work*. London : Palgrave.



9 772339 226130